

**UPAYA MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK**
*(Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab.
Bojonegoro)*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro



OLEH :

IMAM DZURIYAT

NIM : 2007.05501.01689

NIMKO : 2007.4.055.0001.2.01598

PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SUNAN GIRI BOJONEGORO**

2 0 0 9

NOTA PERSETUJUAN

Bojonegoro, Juni 2009

Hal : Munaqosah Skripsi
a.n Imam Dzuriyat
Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
"Sunan Giri" Bojonegoro

di-
Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan /penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Imam Dzuriyat
NIMKO : 2007.4.055.0001.2.01598
Jurusan : PAI
Judul : UPAYA MASYARAKAT EKONOMI LEMAH
DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK
(Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab.
Bojonegoro).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding *munaqosah* skripsi Fakultas Tarbiyah, untuk itu kami mengharapkan agar dapat segera *dimunaqosahkan*.

Demikian atas perhatian Bapak, kami sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Sugeng, M.Ag

Pembimbing II



Drs. H. Chafidz Affandi

MPd.1

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 4 Juli 2009

Jam : 08.00

Tempat : STAI Sunan Giri Bojonegoro

Telah diterima dan disyahkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Mengesahkan

Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Giri Bojonegoro

Drs. H. MOH.MUNIB,MM,M.pd.I

Dewan Penguji :

1. Ketua	Drs. H.BADARUDDIN A, M.Pd.I	(	)
2. Sekretaris	Drs. MOH. SALAMUN	(	)
3. Penguji 1	Drs. SUGENG, M.Ag	(	)
4 Penguji 2	Drs.M.MASJKUR,M.Pd.I	(	)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini
khusus kepada :

1. Ibu dan Bapak yang telah mendidiku
hingga aku berhasil
2. Kakakku yang telah membantu
menyelesaikan skripsi ini
3. Adik-adikku yang selalu mendoakanku
4. teman-temanku di STAI Sunan Giri
Bojonegoro

MOTTO

فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا

(6 - 5 : الإنشراح)

Artinya :

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan datang kelapangan.
Sesungguhnya bersama kesulitan datang keringanan*

Yayasan Penyelegara Penterjemah Al-Qur'an, 1989
Al-Qur'an dan Terjemahnya.
Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia

*" Di Tengah-Tengah Kesulitan
Selalu Ada Kesempatan "*

(Albert Einstein)

4. Kepala Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro beserta segenap perangkat yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Tanjungharjo.
5. Segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan segala kemudahan yang berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut membantu dan memberikan sumbangan fikiran dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas semua jasa yang diberikan, penulis sampaikan semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat Ridlo dari Allah SWT. Amin

Sebagai akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karenanya segala saran dan kritik kearah perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Bojonegoro, Juni 2009

Penulis,



Imam Dzuriyat

ABSTRAK

Dzuriyat, Imam, 2009. **UPAYA MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK** (*Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro*), Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam "Sunan Giri" Bojonegoro. Pembimbing I : Drs. Sugeng, M.Ag dan Pembimbing II : Drs. H. Chafidz Affandi

Kata Kunci : Ekonomi Lemah, Meningkatkan Pendidikan

Akhir-akhir ini perbincangan masalah kemiskinan dan ekonomi lemah muncul kembali dan menjadi tema utama diskusi baik berbagai kalangan akademis, praktisi dan aktifis masyarakat. Masalah tersebut bukan masalah baru karena sudah dua dasa warsa yang dulu masalah ini sudah didiskusikan ditingkat mereka. Telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah perekonomian dan menghapus kemiskinan serta mencegah kemiskinan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut belum banyak membuahkan hasil yang dapat dikatakan menggembirakan yang pada akhirnya masalah sosial, budaya, politik yang berupa kesenjangan-kesenjangan diantara yang besar dan kecil, yang kaya dan miskin, bahkan antara pulau jawa dengan pulau luar jawa.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman serta semakin majunya teknologi, tentunya pendidikan semakin menduduki tempat penting dalam mengejar penguasa Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Untuk mengimbangi pesatnya kemajuan jaman, maka berbagai kebijakan baru dalam pendidikan yang bersifat membangun semakin digalakkan oleh pemerintah Indonesia, seperti kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan perubahan kurikulum. Dimana dengan kebijakan berkualitas dan bersumberdaya tinggi, apalagi menyongsong era globalisasi saat ini.

Namun demikian kebijakan pendidikan tersebut tidaklah berjalan dengan mulus, dalam arti upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan yang jumlahnya sangat besar dari keadaan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat besar dengan keadaan perekonomian yang memprihatinkan yang disertai dengan berbagai masalah yang melingkupinya serta dengan prosentasi kemiskinan yang besar yang memerlukan

Dari kenyataan tersebut diatas maka penulis merasa perlunya diadakan pembahasan-pembahasan yang membicarakan masalah perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan, yang dalam hal ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "Upaya Masyarakat Ekonomi Lemah dalam Meningkatkan Pendidikan Anak (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro).

Upaya pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak khususnya di desa Rowokangkang dan didaerah lain pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkait untuk

mengetahui berbagai masalah yang berkaitan dengannya dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, ada dua pendekatan yang dijumpai yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan empiris, pendekatan teoritis disajikan dalam Bab I (pertama) dan Bab II (dua) yang masing-masing membahas pendahuluan dan tinjauan teoritis, sedangkan pendekatan empiris disajikan pada Bab V (lima) yang kemudian ditutup kesimpulan dan saran.

Dari pembahasan ini penulis ingin mengetahui upaya-upaya masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak, apakah ada pengaruh masalah perekonomian dengan keberhasilan anak dalam meningkatkan pendidikannya.

Adapun metode yang dipakai adalah metode observasi, metode interview dan metode dokumenter. Setelah data terkumpul mengolahnya penulis menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan data kuantitatif diterangkan dan diinterpretasikan dengan menggunakan prosentasi sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan lalu keadaan perekonomian keluarga yang rendah menyebabkan proses pencapaian pendidikan anak terhambat, dan juga faktor-faktor lain yang bisa menghambat pendidikan anak, diantaranya faktor lingkungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
Kondisi Perekonomian Masyarakat Pedesaan Indonesia.....	8
1. Gambaran Singkat Masyarakat Pedesaan.....	8
2. Pengertian dan Gambaran Tingkat Ekonomi Lemah.....	10
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kemiskinan.....	13
4. Strategi Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Perekonomian Rakyat.....	18
A. TINJAUAN	
Tentang Pendidikan Indonesia.....	23
1. Gambaran Singkat Pendidikan Indonesia.....	23
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Populasi Dan Sampel.....	38
B. Sumber Data.....	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Lokasi penelitian.....	41
E. Metode Analisa Data.....	42
BAB IV KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Latar Belakang Obyek.....	43
BAB V HASIL PENELITIAN.....	48
A. Penyajian dan Analisis Data.....	48

BAB VI	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		Viii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah sepatutnyalah kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah dicapai lebih dari setengah abad dengan pengorbanan darah dan nyawa ini kita syukuri, sebab dengan pengorbanan ini bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang untuk mengejar ketertinggalanya dari negara lain yang sudah mampu membangun negaranya. Negara Indonesia termasuk negara yang telah dicap sebagai negara dunia ketiga, dimana fenomena kemiskinan tidak atau belum dapat diantisipasi secara optimal, sehingga keadaan semacam ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan bangsa yang berakibat lemahnya tingkat intelektual yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat lemah, khususnya di Indonesia.

Masyarakat ekonomi lemah yang hidup dalam segala kesulitan serta hidup dalam lingkungan yang memperhatikan .ataupun kita melihat kehidupan orang-orang desa yang notabene bertingkat ekonomi lemah dan menggantungkan kehidupannya dengan bertani (agraris), hidup dengan sangat sederhana serta berpenghasilan yang sangat rendah, yang sekiranya mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka perbuat untuk melepaskan diri dari keadaan yang sangat memprihatinkan.

Fenomena semacam ini sangat erat hubungannya dengan prestasi pendidikan yang mereka kehendaki, Karena disamping masyarakat lemah

terdesak oleh berbagai macam kebutuhan, juga mereka tidak mampu untuk mendapatkan jenis sarana yang layak untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang diharapkan .

Pendapat konvensional yang hidup di benak para perencana pembangunan di Indonesia adalah pendidikan merupakan terapi paling tepat untuk memajukan negara sedang berkembang yang pada umumnya hidup dalam keadaan serba terbelakang¹. Seorang petani di desa yang miskin dan bodohpun mungkin juga berpikir demikian, meskipun ia bodoh dan miskin tetapi ia juga mempunyai pemikiran bahwa pendidikan merupakan jalan menghindarkan diri dari kemiskinan. Dengan menyekolahkan anaknya, walaupun dengan susah payah, ia berharap agar anaknya mempunyai pendidikan dan keterampilan yang tinggi, sehingga walaupun terdapat pula kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi dan diperbaiki lebih dalam lagi. Pembangunan sebagai usaha untuk merubah masyarakat kenyataannya melahirkan fenomena yang sekaligus berlawanan. Di satu pihak pembangunan menjadi kebanggaan bangsa karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sedang dipihak lain pertumbuhan ekonomi tinggi membentuk tingkat kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin lebar. Pemerataan belum menjadi kenyataan dan masih merupakan angan-angan. Pertumbuhan ekonomi, prosentase terbesar dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, sedang sebagian besar penduduk hanya menikmati sebagian kecil dari hasil pertumbuhan².

¹ Loekman Sutrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Jogjakarta : Kanisius, 1997, hal 25.

² Susetyawan, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan* Cet. II. Eds. Moh. Mahfud MD. Dkk, Jogjakarta : UII Press, 1999, hal 12.

Dari pengalaman tersebut dapat dimisalkan dalam pembangunan jaringan irigasi. Tujuan resmi dari pembangunan itu tidak dipersoalkan, yaitu bahwa jaringan irigasi itu dibangun untuk kepentingan rakyat kecil. Orientasi pembangunan seperti itu sudah jelas terarah kepada kepedesaan dan pertanian. Tapi yang memperoleh keuntungan mungkin bukan hanya pedesaan melainkan kontraktor ibukota, termasuk didalamnya kaum profesional yang menyusun desain proyek dan melakukan manajemen konstruksi. Apabila proyek jaringan irigasi itu rampung dikerjakan, belum tentu rakyat bisa memakainya. dalam kasus seperti ini, maka yang mengambil manfaat adalah kontraktor atau birokrat perkotaan.

Dan memang untuk memajukan perekonomian rakyat maka perlu diciptakan pergeseran penduduk sistem kerja penduduk, dari sektor yang bersifat tradisional (pertanian) ke sektor yang modern (industri) yang perkembangannya lebih cepat. Itu berarti perubahan struktur lapangan kerja dari pekerjaan yang kurang membutuhkan kahlian (*unskilled occupation*) ke arah pekerjaan yang membutuhkan keahlian (*skilled occupation*)³. Dan itu merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kenyataannya, kemampuan anggota masyarakat dalam menjawab perubahan tersebut amat beragam. Lapisan menengah keatas atau lazim digolongkan sebagai ekonomi kuat lebih mudah menjawab perubahan tersebut. Rata-rata tingkat pendidikan mereka relatif tinggi dan mereka mempunyai keterampilan yang lebih tinggi. Karena itu, mereka pada umumnya

³ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jogjakrata : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal 140.

mampu memenuhi kualifikasi untuk mengisi kesempatan kerja yang dibutuhkan. Disamping itu, mereka juga mempunyai cukup modal atau paling tidak mempunyai akses pada sumber-sumber keuangan. Karena itu, mereka pada umumnya memiliki potensi kuat untuk mengembangkan aset ekonominya.

Kondisinya sangat berbeda dengan lapisan bawah. Tingkat pendidikan mereka pada umumnya rendah. Oleh karena itu mereka selalu kalah bila bersaing ketika ada kompetisi kesempatan kerja, bahkan sebagian dari mereka sudah kalah sebelum bertanding. walaupun ada yang memenangkan kompetisi, mereka lebih sering tergolong oleh nasib baik dari pada oleh pemenuhan kualifikasi.

Dan masalah pendidikan kembali berputar dan mengkait saling menyebabkan dan saling mengakibatkan dengan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Hal itu dapat dijelaskan dengan kata-kata bahwa masyarakat pada tingkat ekonomi lemah secara otomatis kurang mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi baik bagi mereka maupun bagi anak-anaknya karena biaya yang diperlukan untuknya tidaklah ringan dan diluar jangkauan mereka. Meskipun sudah banyak usaha pemerintah maupun pihak lain untuk membangun sekolah-sekolah dan berusaha memberikan bantuan-bantuan berupa beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Dan permasalahan itu berputar pada masalah ekonomi. Karena tingkat pendidikan masyarakat rendah maka tidak ada kemampuan bagi mereka untuk mengembangkan diri dalam masalah ekonomi dan mengangkat mereka dari keadaan yang serba kekurangan. Sehingga mungkin dapat di katakan bahwa kemiskinan dan

kebodohan menjadi satu paket yang selalu berjalan beriringan dan tidak dapat di lepaskan.

Berdasarkan pada beberapa kenyataan yang ada tersebut maka sudah selayaknyalah kita ikut peduli untuk memikirkan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat yang berada dalam satu garis tingkat ekonomi lemah. Sebab kita tahu bahwa masalah tersebut di atas bukanlah satu masalah yang ringan untuk hanya dipikul oleh satu pihak saja.

Dari latar belakang yang ada di atas maka hal itu menjadi suatu alasan yang sangat tepat bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul **UPAYA MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa kenyataan yang menjadi latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro ?
2. Faktor apa yang memotivasi orang tua untuk memenuhi minat mereka dalam meningkatkan pendidikan anak ?
3. Apakah yang menjadi kendala bagi masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi penduduk Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat tingkat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak.
3. Untuk mengetahui apakah kendala masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diadakan penelitian, penulis sangat mengharapkan agar hasil penelitian nanti dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan dan cakrawala pengalaman tentang kesempatan bagi masyarakat yang bertingkat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak.
2. Bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan baik swasta maupun pemerintah meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesempatan bagi masyarakat berekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak.

E. Sistematika Pembahasan

Sebuah sistematika akan mempermudah pembahasan dan pemberian gambaran pemikiran terhadap maksud yang terkandung. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, yang mencakup masalah, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang Kajian Pustaka, yang diuraikan tentang Kondisi Perekonomian Masyarakat Pedesaan Indonesia yang meliputi : Gambaran Singkat Masyarakat Pedesaan, Pengertian Dan Gambaran Tingkat Ekonomi Lemah, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan, Strategi Pengentasan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Tinjauan tentang Pendidikan di Indonesia yang mencakup Gambaran Singkat Pendidikan di Indonesia, Jalur dan Tingkat Pendidikan, Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pendidikan.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian serta Teknik Analisis Data.

Bab IV akan penulis kemukakan tentang Diskripsi Singkat Lokasi Penelitian, yang meliputi Aspek Historis, Monografis Dan Demografis.

BAB V hasil penelitian yang meliputi, penyajian data dan analisis data.

BAB VI Pada bab akhir skripsi penulis kemukakan tentang penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kondisi Perekonomian Masyarakat Pedesaan Indonesia

1. Gambaran Singkat Masyarakat Pedesaan

Di Indonesia yang telah kita ketahui bersama merupakan negara yang mempunyai letak geografis di daerah tropis yang mempunyai tanah yang subur dan dengan musim yang mendukung pertanian merupakan negara agraris dan ini mempunyai makna bahwa sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani (bercocok tanam). Dan karena demikian besarnya jumlah penduduk pedesaan itu merupakan suatu masalah yang berat dan mencolok bagi Indonesia yang sedang membangun ini dan sekaligus menjadi ciri utama dari keadaan kependudukan Indonesia.

Untuk memberikan kejelasan tentang keadaan kependudukan Indonesia yang tinggal di desa dan di kota, dapat digambarkan sebagai berikut:

“Pada tahun 1961, lebih sedikit dari 85 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan selebihnya tinggal di daerah perkotaan, sesuai dengan kategori kota yang ada pada masa itu. Dua puluh tahun kemudian, sesuai dengan data sensus penduduk tahun 1980, sebanyak 113 juta dari 147,5 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, ini berarti bahwa kurang lebih 80 persen penduduk Indonesia merupakan penghuni desa. Pada sensus tahun 1990 persentase penduduk desa menurun menjadi kurang sedikit dari 80 persen, tetapi jumlahnya menjadi lebih dari 147,80 juta jiwa.”¹

¹ Bahrein T Sugihen M, *Sosiologi Pedesaan : Suatu pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996 hal. 92.

Begitulah keadaan penduduk Indonesia yang ada saat ini yang menjadi ciri pokok masalah kependudukan Indonesia, dan itu menggambarkan bahwa keadaan kependudukan Indonesia masih menjadi masalah yang berat yang harus dipecahkan.

Disamping jumlah penduduk Indonesia dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, distribusi penduduk yang tidak merata (antara satu daerah atau pulau, bahkan antara satu propinsi dengan yang lainnya) juga merupakan satu hal yang menjadi ciri pokok yang menjadi problem nasional. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, Madura dan Bali, yang luas keseluruhannya hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia. Sementara di pulau-pulau lain, Kalimantan, Sumatera, Irian, Sulawesi dan kepulauan di Maluku yang perbandingan luasnya jauh diatas pulau Jawa, Madura dan Bali kepadatan penduduknya sangatlah rendah. Ini merupakan bukti bahwa distribusi penduduk Indonesia sangat tidak merata. Hal ini disebabkan oleh urbanisasi yang berkaitan dengan usaha mencari kemakmuran di kota besar.

Namun, disamping masalah penduduk yang besar dan distribusinya yang tidak merata, ada satu lagi hal yang menjadi ciri yang juga tak kalah menonjolnya dengan yang lain, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, keadaan tempat pendidikan yang rendah, dan penguasaan keterampilan yang kurang.

Sementara data dari *World Competitiveness Report* (1996) menunjukkan bahwa peringkat daya saing sumber daya manusia Indonesia dari 46 negara yang disurvei oleh WCR sangat rendah. Dilihat dari indikator SDM tersebut Indonesia menempati peringkat ke-45, yang mencerminkan rendahnya SDM Indonesia.²

2. Pengertian Dan Gambaran Tingkat Ekonomi Lemah

Istilah tingkat ekonomi lemah bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita, sering kita mendengar, membaca dan melihat sendiri di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik tentang masyarakat miskin yang tingkat perekonomiannya sangat lemah dan seakan-akan tidak mampu menunjang kehidupannya. Masyarakat miskin atau tingkat ekonominya lemah pada dasarnya mempunyai arti yang tidak statis, melainkan dinamis, selalu berkembang dan berubah secara relatif seiring dengan perubahan zaman.

Dijelaskan mengenai kemiskinan bahwa :

“Dalam literatur ekonomi, lazim dikatakan bahwa batasan atau garis kemiskinan dibuat berdasarkan pemenuhan konsumsi bahan makanan pokok serta kebutuhan yang bukan bahan makanan yang terdiri dari perumahan, sandang kesehatan, pendidikan dan transportasi. Batas atau garis kemiskinan ini ditentukan atas dasar pemenuhan kebutuhan dasar”³

Jadi, lebih luas lagi, sebenarnya istilah tingkat ekonomi lemah ini mempunyai arti yang sama dengan keadaan miskin, yang pada batas-batas

² Edi Suandi Hamid, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Eds. Moh. Mahfud dkk, Yogyakarta : UII Press, 1997, hal 184.

³ Sunyoto Uman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, Hal 33.

tertentu berarti kekurangan dalam bidang materiil, berpendapatan/berpenghasilan rendah, berkemampuan ekonomi yang kecil, daya beli yang rendah, tidak atau kurang mempunyai akses dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Emil Salim, yang mengatakan bahwa, “kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”⁴.

Suatu kelompok masyarakat dikatakan miskin atau tingkat ekonominya tergolong lemah ini dapat dilihat melalui klasifikasi atau penggolongan masyarakat tersebut, yang ditetapkan dengan tolok ukur :

1. Tingkat Pendidikan

Di Indonesia, tingkat pendapatan digunakan ukuran waktu kerja sebulan. Dengan adanya tolok ukur ini maka siapa yang tergolong miskin dan berupa jumlahnya dapat diketahui. Tolok ukur yang telah dibuat dan digunakan di Indonesia untuk menentukan besarnya jumlah orang miskin adalah batasan tingkat pendapatan per waktu kerja.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan “batasan minimal pendapatan terendah yang disepakati pada tahun 1996 yaitu untuk daerah pedesaan Rp. 27.413 / bulan / orang, sedang untuk daerah perkotaan adalah Rp. 38.246 / bulan / orang”⁵. Batas miskin tersebut benar-benar jumlah pengeluaran yang minimum untuk hidup, atau

⁴ H. Hartomo dan Drs. Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung : Bumi Aksara, hal 329

⁵ Edy Suandi Hamid, *Op Cit.* hal 189.

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kesejahteraan sosial kelompok orang yang berada sedikit diatasnya atau tidak terlalu jauh dengan batas kemiskinan tersebut sesungguhnya masih sangat memprihatinkan. Kemudian Priyono menambahkan :

“Batas kemiskinan bila diukur dengan kebutuhan adalah setara dengan 240 Kg beras per orang per tahun untuk pedesaan dan 360 Kg per orang per tahun untuk perkotaan. Namun pada perkembangan selanjutnya ketentuan garis kemiskinanpun berubah menjadi lebih rinci lagi yaitu, dibawah 240, 240-320, 320-480, dan lebih dari 480 Kg beras. Kalsifikasi ini tampaknya mampu mengelompokkan penduduk secara lebih rinci. Kelompok paling bawah disebut *sangat miskin*, selanjutnya *miskin*, *hampir kecukupan* dan *kecukupan*. ”⁶

Dari data tersebut diatas maka dapat dikatakan, dengan harga beras saat ini yaitu Rp. 2000,- maka keluarga yang tergolong sangat miskin adalah keluarga yang penghasilannya bila dibagi dengan jumlah anggota keluarganya adalah dibawah Rp. 480.000,- pertahun atau Rp. 40.000,- perbulan, jadi bila dengan jumlah anggota keluarga 5, maka keluarga sangat miskin adalah kepala keluarga perbulan penghasilan dibawah Rp. 200.000,- perbulan. Dan kategori miskin bila dalam keluarga, tiap anggotanya berpendapatan Rp. 480.000,- sampai Rp. 640.000,- pertahun atau Rp. 40.000,- sampai Rp. 53.300,-. Dan kategori cukup bila berpendapatan Rp. 53.300,- sampai Rp. 80.000,- perbulan dan kategori kaya bila berpenghasilan diatas Rp. 80.000,- perkapita perbulan.

⁶ Priyono Tjiptoharijanto, *Prospek Perekonomian dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997, hal 72.

2. Kebutuhan Relatif

Tolok ukur kedua adalah tolok ukur kebutuhan relatif perkeluarga yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupannya dengan sederhana tetapi memadai sebagai warga negara yang hidup layak. Tercukupinya tolok ukur ini adalah kebutuhan yang berkenaan dengan biaya sewa rumah/pajak bangunan rumah dan mengisi rumah dengan peralatan-peralatan rumah tangga yang walaupun terbatas tetapi memadai, biaya untuk memelihara kesehatan dan pengobatan, biaya untuk menyekolahkan anaknya, biaya untuk sandang, pangan yang mencukupi.

Setelah kita melihat berbagai macam gambaran kemiskinan diatas maka kita akan mempunyai kesimpulan bahwa orang miskin yang bertingkat ekonomi lemah adalah orang yang terbatas dan kekurangan dalam hal faktor-faktor ekonominya termasuk barang-barang modal.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan

Kemiskinan menurut pandangan umum dapat digolongkan dalam tiga unsur, yaitu : (1) Kemiskinanyang disebabkan aspek badaniyah atau mental seseorang. (2) kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, dan (3) Kemiskinan buatan ⁷

⁷ Hartomo, *Op. Cit.* hal 317.

Kemiskinan disebabkan aspek badaniyah, biasanya orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmaniah. Karena cacat badaniah misalnya, seseorang lantas berbuat atau bekerja tidak wajar seperti menjadi pengemis. Sedangkan yang menyangkut aspek mental, biasanya mereka disifati oleh sifat malas bekerja secara wajar sebagaimana manusia lainnya. Kemiskinan yang kedua adalah karena bencana alam, penyebab ini menyebabkan manusia menjadi kehilangan berbagai faktor ekonomi dan kehilangan berbagai faktor ekonomi dan kehilangan penunjang kehidupan seperti : sawah, rumah, dan toko. Sementara kemiskinan buatan disebut juga kemiskinan struktural, ialah kemiskinan yang ditimbulkan oleh dan dari struktur-struktur ini selain ditimbulkan oleh struktur penenagan atau *nrimo*, memandang kemiskinan sebagai nasib dan malahan sebagai takdir Tuhan.

Berdasarkan dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya langsung berkaitan dengan masyarakat secara menyeluruh pada semua aspek ekonomi sehingga penanganannya harus berlangsung secara menyeluruh dengan strategi yang mengandung kaitan-kaitan semua aspek ekonomi tersebut.

Sementara itu Alfian berpendapat lebih khusus pada penyebab kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan dalam bukunya yang berjudul *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional* dalam bukunya tersebut ia berpendapat bahwa : “Kemiskinan di pedesaan disebabkan pertambahan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan

penambahan pertambahan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan penambahan tanah garapan/pertanian”. Terutama di pulau Jawa dimana kira-kira 2/3 penduduk Indonesia berada, pembukaan tanah garapan baru relatif sedikit sekali terjadi, tidak lain karena tanah yang akan dibuka itu boleh dikatakan tidak ada lagi di atas pulau kecil itu kira-kira 7 persen dari jumlah tanah daratan nusantara ini.

Karena produktifitas tanah-tanah tersebut boleh dikatakan selama ini tidak berhasil ditingkatkan, maka penambahan pekerja relatif tidak menambah produksinya. Hal ini berarti pula pengurangan penghasilan masing-masing pekerja karena pengurangan pemakaian tenaga dari masing-masing pekerja seperti itu sehingga menimbulkan semacam pengangguran tersembunyi. Atau *under employment*.

“Kemudian dijelaskan berkaitan dengan jumlah pengangguran, dalam tahun 1994 tingkat pengangguran terbuka (open employment) mencapai 4,37 % (3,65 juta) dari total angkatan kerja. Total angka pengangguran tersebut relatif rendah dikarenakan pengertian bekerja adalah mereka yang “bekerja minimal satu jam perminggu” (saat belums sensus) Jika dimasukkan pula mereka yang setengah menganggu (under employment), yakni kurang dari 35 jam perminggu, sehingga diperoleh tingkat pengangguran global, maka jumlahnya menjadi jauh lebih besar. Data tahun 1994 menunjukkan bhawa tingkat pengangguran global ini mencapai 39,85 % dari total angkatan kerja nasional”⁸.

Ditinjau dari sini salah satu permasalahan atau faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari sektor pertanian Indonesia terletak pada soal ada dan semakin memuainya pengangguran tersembunyi di daerah

⁸ Edi Suandi Hamid, *Op. Cit.* hal 182

pedesaan. karena sektor-sektor lain dari perekonomian terutama industri, masih belum berkembang buat menyalurkan pengangguran seperti itu secara efektif, maka permasalahannya akan tetap belum terselesaikan. Permasalahan lain, atau kedua, ialah kenyataan bahwa sejumlah penting dari tanah pertanian belum berhasil dipergunakan secara maksimal (yang antara lain masih dimungkinkan melalui penemuan bibit-bibit baru dan pemakaian pupuk modern) untuk dapat memberi hasil semaksimal mungkin. Sejak beberapa waktu terakhir ini usaha ke arah peningkatan produktifitas secara maksimal kelihatan sudah digiatkan⁹.

Sementara dari sisi lain Loekman Soetrisno, mengenai penyebab kemiskinan, mengatakan bahwa :

“Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah permasalahan mutu, baik mutu manusia Indonesia maupun mutu berbagai bangunan fisik yang dihasilkan pembangunan”.

“Akibat mutu yang jelek itu bukan hanya menimpa pemerintah yang harus terus-menerus mengeluarkan ongkos perbaikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah tiap musibah yang datang rusaknya suatu bangunan karena mutu yang rendah maka kemiskinanpun muncul. Banjir yang muncul karena rusaknya sebuah tanggul menghapus dalam sekejap semua milik rakyat yang bertahun-tahun mereka kumpulkan. Dengan demikian mereka kembali menjadi miskin Kurangnya perhatian kita pada mutu hasil pembangunan dengan demikian dapat dikatakan sebagai salah satu sumber kemiskinan di Indonesia”.¹⁰

Sementara bergejolaknya krisis moneter yang melanda Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini semakin mengembangkan dan semakin

⁹ Alfian, *Transformasi Sosila Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : UI Press, 1986, hal 182.

¹⁰ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Cet. I, Yogyakarta : Kanisius, 1995, hal 48.

memperbesar jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Dampak kemerosotan nilai Rupiah terhadap Dolar terhadap kaum buruh terjadi dalam bentuk berlangsungnya PHK secara besar-besaran pada banyak perusahaan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada bangkrut dan dilakukannya penghematan oleh sejumlah perusahaan, resiko terjadinya PHK massal sult dielakkan. Misal, PKH massal sehubungan dengan 16 bank terlikuidasi, diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 tenaga kerja. Sedangkan PHK sehubungan dengan bangkrutnya sejumlah perusahaan properti diperkirakan menelan korban lebih dari 40.000 tenaga kerja.

Hal ini jelas terbukti dengan semakin banyaknya pengangguran dan semakin besarnya kebutuhan pemenuhan kehidupan. Dan dengan berkibarnya krisis tersebut lebih jelas lagi dikatakan oleh Dawam Raharja :

“Paling sedikit, ada tiga sumber kemiskinan baru sesudah krisis moneter. *Pertama*, dilihat dari segi konsumsi. Dengan naiknya harga-harga barang di satu pihak dan kelangkaan barang dilain pihak maka tingkat konsumsi itu terjadi sangat turun. Praktis mereka akan jatuh miskin.

Kedua, memang dari segi angka formal, misalnya kalau kita memakai ukuran dolar Amerika, seperti yang dipakai Bank Dunia, dengan rate sekarang ini, maka orang miskin akan bertambah luas. *Ketiga*, pengangguran. Pengguran yang dimaksud adalah sebagai sumber kemiskinan. Sebab, kita melihat dalam membahas kemiskinan itu sering dilupakan sumber kemiskinan. Jadi menurut Dawam, yang menjadi sumber utama kemiskinan adalah unemployment”¹¹

¹¹ Sjahrir, *Masuk Krisis Keluar Krisis : Para Tokoh Menggugat*, Eds. Henry Raymond dan Dion P. Sihotang, Cet. I, Jakarta : Erlangga, 1999, hal 193.

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan terutama di pedesaan.

4. Strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rakyat

Kita mengetahui bahwa sebagian besar peristiwa terjadinya kemiskinan terdapat di desa ini dikarenakan oleh berbagai sebab seperti yang telah diuraikan di atas, dan untuk pengentasan kemiskinan ini maka secara otomatis lebih besar diarahkan pada pembangunan dan pengembangan desa, walaupun masalah kemiskinan di kota pun menjadi masalah yang besar.

Banyak cara yang bisa dilakukan guna mengatasi masalah kemiskinan, diantara cara pemecahan masalah kemiskinan yang paling urgen adalah :

- a. Latihan pendidikan ketrampilan, dengan adanya latihan ketrampilan ini diharapkan seseorang/anggota masyarakat mempunyai bekal kemampuan untuk terjun dalam dunia kerja. Upaya peningkatan ketrampilan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan dibentuknya Balai Latihan Ketrampilan yang ada di berbagai kota.
- b. Berwiraswasta, modal kemampuan yang berupa ketrampilan akan menunjang atau memberi bekal bagi seseorang memperoleh pendapatan yang dapat diterapkan melalui dunia wiraswasta. Karena bagaimanapun juga tidak semua orang bisa menjadi pegawai negeri, meskipun telah menyelesaikan studinya di suatu pendidikan formal. Jiwa wiraswasta ini perlu ditanamkan sejak anak-anak, sehingga kemampuan berusaha ada pada setiap anak/orang.
- c. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana, pemasyarakatan program keluarga berencana ini sangat diperlukan terutama dalam kaitannya dengan pengendalian jumlah penduduk yang terlampau cepat. Pertumbuhan di

bidang ekonomi dapat mempunyai arti kalau dibarengi dengan upaya pengendalian jumlah penduduk¹²

Sementara pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan, yang hal tersebut bertujuan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Program-program tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah : (1) Pembangunan pertanian (*agricultural development*) (2) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*) (3) Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*), serta (4) Strategi pusat pertumbuhan (*growth center strategy*)¹³ yang dapat dijelaskan :

1. Pembangunan pertanian pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan *out put* dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan, tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian yang diekspor.

2. Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama dari program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja.

¹² H. Hartomo dan Arnicum Aziz, *Op. Cit.* hal 331-332

¹³ Sunyoto Usman, *Op. Cit.* hal 40-48

3. Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktifitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Weterson, ada 6 elemen dasar yang melekat pada program pembangunan semacam ini, yaitu : (a) pembangunan pertanian yang mengutamakan padat karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengambnagkan industri kecil pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberikan dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melaksanakan koordinasi proyek *multisector*.

4. Strategi pusat pertumbuhan (*growth center strategy*)

Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternatif yang diharapkan memecahkan masalah idealisasi jarak desa dengan kota sebagai tempat distribusi hasil produksi ataupun pasar dan sebagai jalur pertumbuhan ekonomi. Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan sebuah pasar di dekat desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan *the centres of 'demonstration effect' of consumers goods*. Informasi semacam ini besar sekali maknanya bagi pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi *gambling* dalam pengembangan usaha.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat adalah dengan mencanangkan program *Inpres Desa Tertinggal (IDT)*.

“Melalui Inpres No. 5/1993, pemerintah meluncurkan program khusus penanggulangan kemiskinan yang disebut Inpres Des Tertinggal (IDT). Sasaran program ini adalah desa-desa miskin baik yang berada di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Program ini dalam implemenasinya tidak berdiri sendiri tetapi diupayakan agar terpadu baik dengan program-program sektoral maupun regional yang kegiatannya mencakup desa-desa miskin tersebut. Program khusus ini harus

memperoleh prioritas utama karena kendati dalam seperempat abad terakhir ini kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik, ternyata masih banyak ditemukan desa miskin yang tersebar diseluruh penjuru tanah air (lihat tabel)”¹⁴

Tabel Lokasi Regional Kantong Kemiskinan di Indonesia (1990-1993)

Wilayah	Luas Kawasan km2	Jumlah Penduduk ribu	Penduduk Miskin		Desa Miskin	
			Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	481,8	36.471	5.087	13,95	6.752	10,30
Jawa dan Bali	135,9	110.302	15.848	14,37	6.188	9,44
Kalimantan	549,0	9.095	2.073	22,80	2.294	3,50
Sulawesi	194,4	12.510	1.414	11,31	1.944	2,97
KTI lain	587,5	10.867	2.708	24,92	3.445	5,27
Indonesia	1.984,7	179.179	27.131	15,14	20.683	31,47

Program IDT pada hakikatnya merupakan bagian penting dari gerakan nasional untuk menaggulangi kemiskinan sekaligus sebagian bagian dari strategi mengembangkan ekonomi rakyat. Melalui program IDT, diharapkan terjadi proses pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur sosial yang kondusif bagi peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan permodalan, mengembangkan peluang kerja dan berusaha, serta penguatan kelembagaan kelompok miskin. Dalam konteks ini, kelompok miskin ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Karena itu, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan manusia.

“Untuk memacu program IDT, pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 20 juta/desa, disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Bantuan dana tersebut diharapkan agar dikelola dengan

¹⁴ *Ibid*, hal 48-49.

prinsip-prinsip : *acceptable* (mudah diterima dan didaya gunakan), *accountable* (dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan), *profitable* (dapat meningkatkan pendapatan), *sustainable* (dapat dilestarikan).”¹⁵

Dana program IDT adalah modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok miskin untuk kegiatan sosial ekonomi yang bersifat produktif. Pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan dan kemauan kelompok miskin sendiri. Dana tersebut digulirkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat digunakan oleh segenap anggota masyarakat yang tergolong miskin secara bergiliran. Ini berarti, bagi anggota kelompok masyarakat, dana program IDT tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok, atau oleh kelompok lain yang belum mendapatkan dana bantuan program IDT.

Untuk memberi dukungan proses pemberdayaan masyarakat dan perubahan struktur sosial melalui program IDT, pemerintah telah menyediakan tenaga sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Tenaga sarjana tersebut diharapkan dapat berperan sebagai pembina kelompok miskin sehingga memiliki kesamaan persepsi dan orientasi untuk mengembangkan diri menuju kesejahteraan hidup. Selain itu mereka juga diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, penghubung, pendorong, serta penggerak dalam membentuk kelompok masyarakat IDT. Dalam kaitan ini, mereka tidak berprestasi sebagai ahli yang menggurui, tetapi lebih sebagai mitra kerjasama. Dengan demikian,

¹⁵ Ibid. hal 50.

keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sendiri.

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Inonesia

1. Gambaran singkat pendidikan Indonesia

Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah penjajah Belanda dan kemudian Jepang sebelumnya masih sangat sedikit dan sangat terbatas jangkauannya atau dengan kata lain rakyat umum Indonesia waktu itu tidak mampu dan bahkan tidak oleh bersekolah pada sekolah penjajah tersebut, sebab sekolah yang ada tersebut hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan kaum kaya saja, sehingga tidak mengherankan bila keadaan pendidikan masyarakat saat itu sangat rendah dan ditandai dengan kebodohan dan banyaknya buta huruf.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih diselimuti oleh kebodohan dan keterbelakangan. Memang setelah Indonesia ada usaha untuk meningkatkan keadaan pendidikan pada masyarakat dan usaha untuk menghilangkan dan menghindarkan masyarakat Indonesia dari kebodohan dan keterbelakangan, hal ini dapat kita lihat dengan ditetapkannya dalam UUD 1945 yaitu pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dimana dalam pasal tersebut dapat kita

ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Pada tahap awal pembangunan, bangsa Indonesia berusaha untuk memberantas buta huruf dan mencegah munculnya penyandang buta huruf baru. Pembangunan dalam bidang pendidikan dilakukan pelita demi pelita, termasuk usaha pemerintah dengan perluasan daya tampung anak usia sekolah yang makin tahun makin banyak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Perluasan daya tampung anak usia sekolah yang makin tahun makin banyak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Perluasan daya tampung anak usia sekolah ditangani secara langsung dengan Instruksi Presiden pada waktu itu tentang pendirian gedung-gedung sekolah dasar baru yang kemudian dikenal dengan SD Impres. Atas usaha yang terus menerus inilah selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1984, waktu itu Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar. Dan pemerataan pendidikan menjadi salah satu bagian dari delapan jalur pemerataan pembangunan yang ditetapkan dalam GBHN. Pada tingkat ini wajib belajar pendidikan dasar diusahakan untuk memberantas buta huruf sekaligus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan selesainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap Indonesia dan dengan relatif berhasilnya pembangunan tersebut dalam berbagai bidang serta dengan semakin berkembangnya teknologi modern saat ini, dimana sumber daya manusia semakin menjadi kunci pokok

penggerak roda pembangunan maka taraf pendidikan Indonesia juga harus ditingkatkan. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat perlu dan penting sebab mengingat dengan berkembangnya teknologi serta terciptanya alat-alat baru yang canggih maka hal itu sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan membutuhkan tenaga-tenaga terampil mempunyai kemampuan untuk mengendalikan teknologi.

Dan untuk mengantisipasi hal itu, pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah kembali merencanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajibdikdas 9 tahun), dimana dalam program ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah yang secara sistematis menginginkan terjadinya peningkatan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan adaptif terhadap penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selain itu, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga merupakan salah satu pengembangan kesempatan memperoleh pendidikan lebih tinggi yang dijangkaukan bagi setiap warga negara baik yang mampu maupun yang tidak mampu untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, yaitu Bab III pasal 6 yang menjelaskan tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, yang berbunyi :

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar”¹⁶

Dengan demikian secara kuantitas perencanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan secara bertahap dapat memperkecil hingga akhirnya menuntaskan buta huruf dan sekaligus mempertinggi tingkat pendidikan dasar rakyat Indonesia. Selain itu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi pendidikan dasar sebagai kompetensi minimal, dimana dalam UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 pasal 13 (1) dijelaskan kompetensi pendidikan dasar tersebut yaitu berbunyi :

“Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah”¹⁷.

Demikianlah sekilas tentang penjelasan pendidikan di Indonesia yang dialami oleh penduduk Indonesia, yang dari pasang surutnya pendidikan tersebut masyarakat Indonesia dengan secara bertahap terbebas dari buta huruf, terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan yang pada gilirannya dapat memiliki sumberdaya yang dapat diandalkan, pendidikan yang memadai dan penguasaan ketrampilan yang baik untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta persaingan hidup.

¹⁶ UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, diperbanyak oleh penerbit Anaka Ilmu, Semarang : 1989.

¹⁷ Ibid. hlm : 14

1. Jalur Dan Jenjang Pendidikan

Untuk meningkatkan sumberdaya manusia, jalan yang paling efektif adalah melalui pendidikan, dan pendidikan itu sendiri dapat ditempuh melalui dua jalur pendidikan, yaitu : jalur pendidikan luar dan jalur pendidikan sekolah.

a. Jalur pendidikan luar sekolah

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 pasal 10 (1) dinyatakan bahwa pendidikan luar sekolah ada yang dilembagakan dan ada yang tidak dilembagakan.

“Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan merupakan pendidikan yang berasal dari proses pendidikan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman dan pengetahuan pribadinya, dan dalam kebanyakan masyarakat, pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan mempunyai peran penting. Jelas pendidikan ini dilaksanakan dalam keluarga dan masyarakat”¹⁸

Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap anak, dimana dalam keluarga diutamakan dasar-dasar kepribadian kepada seseorang dalam keluarga yang kelak diharapkan berkembang menjadi pribadi yang baik.

“Adapaun pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan terencana di luar kegiatan persekolahan yang formal, misalnya Madrasah Diniyah. Dalam hal ini pendidik, fasilitas, cara penyampaian dan alat yang dipakai serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Pendidikan luar sekolah yang

¹⁸ H. Zahara Idris dan H. Lisman Jamal, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : Gramedia, 1992, hal 109

dilembagakan bersifat fungsional dan praktis, serta pendekatannya lebih fleksibel, luas dan terintegrasi.

Hal ini dimaksudkan agar siapa saja dapat belajar lebih lanjut berdasarkan ketrampilan dan pengetahuan pertama yang telah mereka peroleh di keluarga serta mengisi kekurangan yang menghambat mereka ke arah hidup yang lebih baik. Dengan kata lain pendidikan ini mengembangkan pendidikan yang telah diterima anak di keluarga”.¹⁹

b. Jalur pendidikan sekolah

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggaraan di sekolah dengan cara yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang pendidikan dan terbagi dalam waktu-waktu yang tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.²⁰

Sebagai pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisien dan efektifitas di dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat, ia sebagai pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai tanggungjawab dan kewajiban pemberian pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara profesional melalui haluan yang pasti dan diberlakukan dalam masyarakat yang bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah, tujuan, penjenjangan, kurikulum, manajemen dan administrasinya.

¹⁹ Ibid, hal 110

²⁰ Ibid, hal 109

Pendidikan sekolah akan memberikan pendidikan lebih luas yang merupakan pengembangan dari pendidikan yang diperoleh keluarga dan masyarakat. Dan salah satu tugasnya bagi anak-anak adalah mendidik secara profesional untuk memberikan ilmu pengetahuan, ketrampilan jiwa beragama dan sebagainya yang dilakukan oleh guru sebagai pendidik. Hal ini ditegaskan dengan pendapat yang mengatakan : “Tugas yang dilakukan guru di sekolah adalah merupakan tugas pelimpahan dan lanjutan tanggungjawab orang tua dan masyarakat yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjadi contoh teladan dari anak.”²¹

Untuk merealisasikan tujuan tersebut pelaksanaan pendidikan jalur sekolah dilaksanakan melalui jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 Bab IV pasal 11 (1), yang berbunyi :

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Kemudian pada Bab V pasal 12 (1) juga disebutkan bahwa “jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

²¹ Djumbersyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya : Karya Abditama, 1994, hal 109

pendidikan tinggi”. Masing-masing jenjang mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dengan waktu yang tertentu.

2. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan

Dalam melaksanakan pendidikan terhadap masyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap lancar dan behasilnya pendidikan, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat pendidikan. Dan faktor-faktor ini harus mendapatkan perhatian yang khusus bila ingin pendidikan yang kita usahakan ini dapat berjalan dengan lancar, sebab dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut kita dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang mungkin memerlukan perbaikan. Faktor-faktor tersebut adalah :

a). Faktor-faktor yang mendukung pendidikan

Manusia walaupun dilahirkan dalam keadaan yang diumpamakan sebagai kertas yang masih tanpa coretan sedikitpun, dengan pembawaan yang dapat berkembang sendiri, tetapi perkembangan itu tidak akan bersifat positif dalam arti baik kalau tidak melalui proses pendidikan. Karena itu pendidikan adalah suatu faktor penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan adanya pendidikan maka kehidupan manusia dapat menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Sebaliknya bila tanpa pendidikan dan bimbingan baik jasmani maupun rohani berupa pendidikan intelek (ilmu pengetahuan),

susila (keagamaan), dan pendidikan sosial maka orang tersebut belum bisa memenuhi fungsinya sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya.

Untuk dapat melaksanakan pendidikan dan bisa berhasil dengan baik banyak faktor yang mendukungnya, diantaranya :

1. Faktor tingkat pendidikan keluarga

Sebagai manusia tentu tidak terlepas dari masalah pendidikan, karena manusia hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang sarat dengan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua sangat menentukan berhasil tidaknya pendidikan anak-anaknya. Dimana anak yang hidup dalam keluarga yang berpendidikan cukup tinggi akan mendapatkan perhatian yang khusus dalam bidang pendidikannya dibandingkan anak-anak yang hidup dalam keluarga yang berpendidikan rendah.

2. Kondisi perekonomian keluarga

Usaha untuk mencapai keberhasilan pendidikan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama dari pihak orang tua. Perhatian dalam hal biaya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya. Keluarga yang mempunyai tingkat perekonomian yang mapan akan dapat memberikan berbagai fasilitas yang

diperlukan oleh anak untuk menunjang berjalannya pendidikan dengan lancar, sebab kita tahu fasilitas yang dibutuhkan dalam pendidikan tidaklah sedikit, seperti buku-buku, alat praktek dan biaya lainnya.

Hal tersebut diatas didukung dengan pendapat, bahwa :

“Struktur ekonomi dapat menentukan kemampuan keluarga dalam menyediakan fasilitas sarana yang diperlukan anak dalam menela’ah beban pelajaran di sekolah, dari soal makanan sampai soal buku-buku pelajaran”²²

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat bisa dikatakan sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial sebagai wadah dan wahana pendidikan serta medan kehidupan manusia yang majemuk dari segi suku, agama, perekonomian dan lain-lainnya. mengenai peranan lingkungan masyarakat terhadap pendidikan ini di jelaskan bahwa :

“Lingkungan masyarakat adalah merupakan lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah yang akan membentuk suatu kebiasaan, pengetahuan minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan dan keagamaan anak. Dalam lembaga masyarakat atau didalam pergaulan di luar keluarga si anak memperoleh pendidikan yang berlangsung secara informal baik dari para tokoh masyarakat, pejabat atau pengusaha atau dari para pemimpi agama dan lain sebagainya”²³.

²² Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar dasar-Dasar Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal 92.

²³ Djumransyah Indar, *Op. Cit.* hal 66.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang baik mempunyai pengaruh yang baik pula terhadap segala kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan, misalnya : masyarakat yang berada di sekitar Pondok pesantren, dengan berada di sekitar pesantren tersebut maks dengan sendirinya kehidupan anak-anak akan terpengaruh gaya kehidupan pesantren.

b). Faktor-faktor penghambat pendidikan

Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun yang mengacu pada peningkatan sumberdaya manusia. Pemerintah terus menerus mengusahakan pemerataan pendidikan di tingkat dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan tujuan untuk dapat dengan mudah dijangkau rakyat, sehingga seluruh rakyat dapat mengenyam pendidikan seperti yang di cita-citakan dalam UUD 1945.

Namun usaha-usaha pemerintah tersebut dalam pengembangan pendidikan tidaklah berjalan dengan mudah, banyak faktor-faktor yang menghambat pendidikan, antara lain :

1. Biaya pendidikan mahal

Tampaknya biaya pendidikan merupakan masalah yang paling rumit sebab memang kita akui bahwa tiap

kegiatan yang dilakukan manusia tidak terlepas dari masalah biaya ini.

Akhir-akhir ini pemerintah memutuskan untuk membuat ongkos pendidikan menjadi sangat murah dengan mensubsidi setiap kegiatan proses belajar dengan tujuan agar semua warga negara Indonesia dapat menikmati pendidikan. Namun dalam situasi empiriknya, ongkos pendidikan menjadi mahal. Berdasarkan peraturan resmi pemerintah, murid-murid sekolah harus dibebaskan dari pembayaran uang sekolah. Namun walaupun mereka tidak membayar uang sekolah, mereka tetap dikenakan berbagai ongkos dari pihak sekolah.

Ongkos pendidikan yang tinggi menyebabkan drop out di kalangan kelompok miskin di Indonesia. Dan ini berarti anak-anak dari kalangan keluarga miskin akan mengalami stagnasi sosial ekonomi dan budaya. Karena pendidikan rendah, mereka harus pula mau menerima pekerjaan yang rendah, baik dari segi upah dan jenisnya. Mobilitas sosial mereka pun akan terhambat karena pekerjaan mereka, dari segi jenis maupun upah akan membuat mereka tetap mewarisi status sosial orang tua mereka. Singkatnya anak-

anakn dari keluarga akan mewarisi kemiskinan orang tua mereka.²⁴

2. Kegiatan dan perekonomian keluarga

Kita telah mengetahui bersama bahwa masyarakat kita sebagian besar hidup sebagai petani dan buruh tani, dengan demikian kita dapat membayangkan keadaan perekonomian mereka, kondisi hidup yang pas-pasan, kehidupan keluarga sehari-hari tercurahkan pada pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan keluarga, sehingga mengenai pendidikan anak-anaknya dengan sendirinya kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian sewajarnya, dan bahkan mungkin ada pendapat yang mengatakan pendidikan itu tidak penting sebab akan mengganggu anak-anak yang sedang bekerja membantu orang tua mencari nafkah.

Disamping alasan diatas keadaan perekonomian yang lemah secara otomatis kurang mampu membiayai pendidikan anak-anak sampai ke jenjang yang tinggi sebab biaya yang diperlukan untuk itu tidaklah ringan.

3. Cara orang tua mendidik anak yang salah

“Hambatan ini disebabkan karena kurang tepatnya orang tua dalam memperhatikan, membimbing dan mendidik anak. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya kurang acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan

²⁴ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius, 197, hal 26

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tau bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya”²⁵.

Keadaan seperti ini bisa terjadi pada keluarga miskin maupun kaya, bagi keluarga miskin, selain kemampuannya dalam hal ekonomi, mereka juga sibuk dengan pekerjaannya untuk mencari nafkah untuk biaya hidup keluarga. Sedangkan hal itu bisa terjadi pada keluarga yang kaya yang disebabkan salah satunya adalah orang tua sibuk dengan karirnya sendiri-sendiri sehingga melupakan tentang pendidikan anaknya.

4. Mental sebagai masyarakat

Dalam hal ini adalah mental sebagai masyarakat yang memandang/menganggap bahwa penekolahan anak akan merugikan mereka, anak menjadi malas diajak bekerja, dalam arti mereka tidak mau turun ke sawah untuk membantu orang tuanya karena tidak terbiasa bekerja di sawah. Ada lagi yang berpendapat bahwa anak walaupun disekolahkan tinggi toh pada kenyataannya banyak yang menganggur, apalagi bagi anak perempuan, walaupun bersekolah tinggi pada akhirnya juga akan kembali ke

²⁵ Drs. Slameto. *Op. Cit.* hal 63.

dapur. Jadi mereka merasa sangat rugi jika menyekolahkan anaknya sampai tinggi tetapi ternyata tidak menjadi pegawai negeri.

Demikianlah beberapa faktor yang menghambat pengembangan pendidikan terutama semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar pula hambatannya, sehingga hal ini jelas mengakibatkan sulitnya pendidikan berkembang dalam masyarakat yang memerlukan pemecahan yang tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subyek suatu penelitian.¹ Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat ekonomi lemah di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, berjumlah 101 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.² Untuk menentukan besarnya sampel yaitu apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua dan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila jumlah subyeknya lebih dari seratus, maka dapat diambil antara 10- 15 % atau lebih yang bisa mewakili populasi yang ada.

Jadi penulis mengambil sampel 25 orang sehingga penelitiannya adalah penelitian sampel.

B. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dilapangan (*penelitian lapangan*)

Yaitu berupa tanya jawab dengan perangkat desa, tokoh desa dan masyarakat. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 108

² *Ibid.*, hal. 109

untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.³

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dipergustakaan (*penelitian perpustakaan*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan lain-lainnya.⁴

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

1. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah yang biasa diartikan dengan suatu pengamatan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro yang meliputi :

- a. Kondisi fisik yaitu tentang kondisi perumahan, jalan, bangunan umum, dan fasilitas lainnya.
- b. Kondisi non fisik yaitu tentang struktur organisasi, perkembangan desa, program kerja.

³ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 28

⁴ *Ibid.*,...

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Andi Offset, 1989, hal. 136

- c. Mengamati pekerjaan masyarakat ekonomi lemah di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro,

2. Metode Interview

Interview atau yang lebih dikenal dengan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.⁶

Adapun metode interview ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
- b. Faktor yang memotivasi orang tua untuk memenuhi minat mereka dalam meningkatkan pendidikan anak
- c. Kendala bagi masyarakat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh beberapa laporan-laporan, catatan-catatan, manuskrip atau agenda yang dimiliki oleh desa atau tempat penelitian.⁷

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang :

- a. Sejarah Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro

⁶ Mardalis, *Op. Cit.*, hal. 64

⁷ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 206

- b. Batas wilayah, luas wilayah Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
 - c. Kondisi sumber daya alam Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
 - d. Jumlah penduduk Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
 - e. Daftar pekerjaan penduduk Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
 - g. Struktur organisasi Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro.
4. Metode Angket

Metode Angket adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden, hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana yaitu : “ Metode angket adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat “.

D. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. Hal ini disebabkan karena desa Tanjungharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Kapas yang termasuk dalam desa yang maju. Hal ini dibuktikan dengan diikutsertakannya desa Tanjungharjo mewakili Kec. Kapas atau Kab. Bojonegoro dalam berbagai program yang dikembangkan pemerintah pusat maupun lomba-lomba tingkat wilayah dan nasional.

E. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah metode diskriptif kualitatif.

Penelitian diskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian baru. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan dilakukan. Dalam penelitian ini tidak ada perlakuan yang diberikan / dikehendaki seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. Adapun langkah-langkah dalam metode ini adalah sebagai berikut :

1. Setelah data terkumpul kemudian diadakan identifikasi dan kategorisasi data .
2. Selanjutnya diadakan interpretasi dan prosentase data analisa statistika yang penulis gunakan adalah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan : P = Prosentase

F = Frekwensi

N = Jumlah Responden

BAB IV

KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Tinjauan Historis

Berdasarkan sejarah bahwa desa Tanjungharjo merupakan penyatuan dari tiga desa kecil yaitu : Tandingoro, Ngitik dan Karangrejo. Tandingoro berasal dari nama riwayat pertandingan antara tentara Pajang dengan tentara Mataram di tengah-tengah *oro-oro* sehingga diambil dengan nama Tandingoro.

Karangrejo dulunya menjadi tempat pemimpin-pemimpin desa untuk bermusyawarah mengambil keputusan sehingga timbullah nama Karangrejo, sedangkan desa Ngitik digunakan untuk *menitik* atau mengambil hasil musyawarah yang dicapai di desa Karang disitulah diambil nama desa Karang.

Dukuh Tandingoro dahulu merupakan nama desa Tandingoro sekitar tahun 1600-an, kepala desanya berturut-turut mulai dari Ki Usah, M. Sidiq, Rono Prawiro sampai kurang lebih 8 kali dan yang terakhir adalah Sengkrik pada akhir tahun 1926 M. disamping itu ada desa Karang dan desa Ngitik, adapun proses pengembangannya menjadi satu desa atas musyawarah ketiga desa kecil disatukan menjadi desa Tanjungharjo.

Desa Tanjungharjo terbagi menjadi 3 pedukuhan :

1. Dukuh Ngitik
2. Dukuh Karangrejo
3. Dukuh Tandingoro

Namun melihat bekas rumah kepala desa lebih banyak berada di desa Tandino, usia desa Tandingoro dapat diketahui lewat proses penyatuan desa ketika kepala desa Karangrejo (Kasmin) / Sumo meninggal dunia, atas perintah pemerintahan Belanda disatukanlah dengan desa Ngitik yang pada waktu itu kepala desanya Martodidjojo. Akhirnya desanya dinamakan Karangrejo dengan pemerintahannya berjalan sebagaimana mestinya.

Pada suatu saat kepala desa Tandingoro / Sengkrik menunaikan ibadah haji dan tidak dapat kembali pulang karena meninggal di tanah suci. Atas perintah Bupati Bojonegoro, R. Sumantri (R. Adipati Ario Kusumo Adinegoro) desa Karang dan Tandingoro dijadikan satu, maka diadakan pemilihan kepala desa dengan system sesek yaitu hak pilih (kepala somah) pada sekitar tahun 1627.

Yang mengikuti pemilihan pada waktu itu ada tiga calon yaitu Kasimin / Martodidjojo (kades Ngitik), Sodiwongso dan H. Ngali. Hasil perhitungan dari ketiga calon tersebut dimenangkan H. Ngali sehingga H. Ngali menjadi kepala desa Tanjungharjo yang pertama kali, kemudian diganti oleh Sudirman selama 6 bulan, diganti lagi oleh Sumodiharjo, 13 tahun kemudian diganti Darnodiharjo, 2 tahun kemudian diganti Renggo Buedi

Susilo selama 32 tahun, kemudian diganti oleh Suyono dan sekarang dijabat oleh Basuki.

2. Tinjauan Geografis

Wilayah Desa Tanjungharjo berada di 3 Km dari ibukota kecamatan yaitu Kecamatan Kapas, dan 5 Km dari ibukota kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro.

Batas wilayah Desa Tanjungharjo adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Wedi
- b. Sebelah Selatan : Desa Tapelan
- c. Sebelah Barat : Desa Bangilan
- d. Sebelah Timur : Desa kedaton

Luas wilayah Desa Tanjungharjo dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Luas Pemukiman : 116,46 Ha
- b. Luas Pertanian Sawah : 409,15 Ha
- c. Luas Ladang/Tegalan : 8,00 Ha

Potensi irigasi yang dimiliki Desa Tanjungharjo adalah Sungai dan Waduk, dengan penghasilan dari tanah persawahan berupa padi dan kedelai. Sedangkan potensi dari tanah ladang menghasilkan buah-buahan berupa mangga dan salak.

3. Tinjau Demografis

Bila ditinjau dari segi kependudukannya, maka penduduk Desa Tanjungharjo seluruhnya berjumlah 5.562 jiwa, dengan perincian terdiri dari 2.830 jiwa adalah laki-laki dan 2.732 jiwa adalah perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 1474 kepala keluarga.

Dari sejumlah penduduk Desa Tanjungharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani berjumlah 1476 orang dan 279 orang sebagai pekerja disektor jasa/perdagangan dan 326 orang pekerja disektor industri.

Apabila diperinci dari bidang mata pencaharian di sector jasa/perdagangan dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Status	Jumlah
1	Perangkat Desa	11 Orang
2	PNS	62 Orang
3	TNI	12 Orang
4	Guru	39 Orang
5	Mantri Kesehatan/Perawat	3 Orang
6	Pensiunan TNI/Sipil	18 Orang
7	Pegawai Swasta	116 Orang
8	Pegawai BUMN/BUMD	76 Orang
9	Warung	8 Orang
10	Kios	18 Orang
11	Toko	21 Orang
12	Tukang Kayu	17 Orang
13	Tukang Batu	23 Orang
14	Tukang Jahit	8 Orang
15	Tukung Cukur	3 Orang
16	Persewaan	4 Orang

Dari sisi pemerintahan desa dapat dijelaskan jumlah perangkat desa yaitu : kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, kepala urusan 5 orang, kepala dusun 3 orang dan staf 1 orang.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Tanjungharjo bervariasi, diantaranya adalah 151 orang tidak tamat SD Sederajat, 1.314 orang tamat SD Sederajat, 1.434 orang tamat SLTP/Sederajat, 1.418 orang tamat SLTA/Sederajat, 41 orang tamat D-2, dan 2 orang tamat D-3 serta 33 orang tamat S-1.

Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Tanjungharjo adalah : Taman Kanak-Kanak berjumlah 5 buah, bangunan SD/Sederajat 4 buah, bangunan SLTP/Sederajat 1 buah serta bangunan SLTA/Sederajat 1 buah.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Panyajian dan Analisis Data

Dalam penyajian data ini, penulis membahas data-data yang diperoleh melalui metode observasi, interview dan dokumenter.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan yang telah penulis rumuskan pada bab I, penulis membatasi pembahasan menjadi tiga batasan yaitu :

1. Keadaan ekonomi masyarakat desa Tanjungharjo
2. Tentang keadaan pendidikan masyarakat desa Tanjungharjo dalam meningkatkan pendidikan anak
3. Tentang upaya-upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan pendidikan anak

Untuk lebih jelasnya dari tiga bahasan tersebut dijelaskan dalam penyajian data berikut yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh lapangan.

1. Keadaan sosial ekonomi desa Tanjungharjo

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Tanjungharjo secara umum dapat dikatakan bertumpu pada mata pencarian sebagai petani yang bercocok tanam disawah dan diladang. Sementara dalam anggapan masyarakat desa Tanjungharjo mengenai apa yang dikatakan sebagai petani adalah orang-orang yang mempunyai beberapa petak tanah bidang pertanian

atau persawahan baik yang dikerjakan sendiri, atau diupahkan kepada orang lain untuk mengerjakan sawah dengan perhitungan-perhitungan yang tertentu maupun yang disewakan kepada orang lain. Jadi disini yang dikatakan sebagai petani adalah lebih luas cakupannya, yaitu tidak saja orang yang mempunyai beberapa hektar sawah yang disebut sebagai petani tetapi semua orang yang mempunyai, baik sempit atau luas, tanah pertanian.

Sementara yang disebut dengan buruh tani adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai tanah pertanian dan pekerjaannya hanya mengerjakan tanah pertanian orang lain dengan jalan menyewa atau dengan jalan lain seperti mengerjakan dengan upah separo hasil (jawa : maro).

Sebagai petani mereka tidak terlepas dari keadaan alam sekitar, dalam artian bahwa pertanian yang mereka usahakan sangat tergantung pada jenis musim yang ada dan keadaan perairan yang sangat berpengaruh pada usaha pertanian. Pada musim kemarau mencapai klimaks, dimana pengairan kurang stabil dan bahkan sangat kekurangan air, banyak tanaman yang mati layu kekurangan air padahal sudah banyak biaya yang mereka keluarkan untuk masa penanamannya. Sedangkan pada musim penghujan terlalu banyaknya air juga kurang menguntungkan bagi pertanian.

Sebenarnya tanah pertanian di desa Tanjungharjo dapat digolongkan sebagai tanah yang subur, hal ini terbukti dengan dapat tumbuhnya berbagai macam tanaman pertanian baik itu padi-padian dan palawija. Namun satu kendala lagi yang seiring terjadi yang hal ini cukup mengkhawatirkan masyarakat petani adalah hama tanaman, baik itu tikus, ulat dan belalang

serta hama-hama lain yang tak jarang menyerang tanaman para petani sedangkan petani sendiri hanya dengan obat-obatan insektisida dan obat-obatan lain tidak mampu mencegahnya sehingga pada gilirannya dapat mengakibatkan gagalnya panen.

Mungkin yang menjadi sebab utama dari ketidakmampuan dari petani di desa Tanjungharjo dalam mengelola pertanian adalah karena mereka hanyalah petani biasa yang bekerja secara tradisional dan hal tersebut terjadi karena turun temurun yang mewariskan pekerjaan tani secara tradisional. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh melalui interview penulis dengan beberapa petani tradisional mengenai usaha pertanian mereka, dimana mereka menerangkan bahwa mereka bertani dengan tidak didasarkan pada kemampuannya melainkan mereka hanya ikut-ikutan orang tua mereka. Selain itu mereka tergolong petani yang tradisional dimana mereka menggunakan cara-cara bercocok tanam yang tradisional dan dengan alat-alat yang tradisional pula. Selain itu pertanian di desa Tanjungharjo juga tergolong kurang dalam hal penyuluhan-penyuluhan tentang pertanian.

Selain hal di atas tersebut, petani yang bersifat tradisional di desa Tanjungharjo dalam menanam tanaman pertanian tidak berorientasi pada pasar melainkan pada kebutuhan mereka sehingga para petani hanya menanam tanaman yang sekiranya mereka dapat mempergunakannya kelak. Sehingga mereka menjual hasil pertanian setelah kebutuhannya terpenuhi. Mereka memperkirakan penjualan hanya dengan pengalaman dan kebiasaan

saja tanpa didasarkan pada prospek dan peluang serta keadaan atau pangsa pasar yang mungkin akan terjadi karena pengaruh politik.

Sehingga dengan demikian tak jarang ketika masa tiba harga gabah (sebagai hasil utama pertanian di desa Tanjungharjo) dan hasil-hasil pertanian lainnya turun secara drastis karena hasil panen tersebut melimpah di pasaran. Hal demikian dapat dimaklumi karena pemasokan barang yang melimpah sehingga mengakibatkan harga turun. Yang lebih memprihatinkan lagi mereka tidak bisa menahan hasil pertaniannya lebih lama lagi di lumbung untuk menanti harga naik sebab kebutuhan lain mendesak untuk segera terpenuhi sehingga dengan terpaksa mereka menjual dengan harga murah, itu pun bila petani berhasil memanen pertaniannya dengan baik.

Begitu pula dengan nasib buruh tani, mereka hanya mempunyai sebidang tanah yang cukup untuk perumahan saja serta sedikit ladang, dimana ladang tersebut biasanya ditanami sayur-sayuran untuk makanan setiap harinya ataupun hanya untuk ditanami ketela rambat dan ketela pohon yang ditanam sekedar untuk *tombo kepingin*. Memang bila musim tanam tiba tenaga mereka sangat dibutuhkan sehingga sedikit mereka mempunyai pekerjaan. Mereka bekerja sebagai buruh yang menanam padi atau palawija atau membersihkan tanaman dari rumput-rumput pengganggu dengan upah yang rendah, atau bagi buruh tani yang mempunyai sapi atau kerbau untuk membajak sawah mereka pada musim tanam tersebut. Akan tetapi bila musim tanam sudah berlalu kembali para buruh tani ini menjadi pengangguran, terkadang diantara buruh tani tersebut ada yang bekerja

diluar pertanian misal mereka bekerja menjadi kuli bangunan. Pekerja yang demikian itu di masyarakat desa Tanjungharjo dikenal dengan sebutan pekerjaan *serabutan* (campuran). Maksudnya pada musim tanam para pekerja bekerja sebagai buruh tani di pertanian tetapi pada musim lain mereka bekerja apa adanya, setiap ada kemungkinan peluang mereka masuki. Dan bagi mereka yang memiliki modal ada yang berusaha sendiri dengan menyewa sebidang tanah dari petani lain dengan demikian mereka mendapat pekerjaan dengan mengolah dan menanam tanah sewaan dengan tanaman-tanaman produktif. Atau mungkin mereka berusaha mengerjakan tanah petani lain dengan perhitungan-perhitungan tertentu sesuai dengan perjanjian dengan petani tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan penduduk yang pekerjaannya sebagai petani tentang hasil pertaniannya dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan keluarga mereka, rata-rata penduduk tersebut mengatakan bahwa biaya penanaman, benih dan pupuk dan biaya-biaya lain cukup tinggi, dan bila dibandingkan dengan hasil panen (yang biasanya harga turun) yang didapat untungnya tidak terlalu tinggi sehingga hanya cukup untuk kebutuhan pokok mereka saja. Akan tetapi tambah mereka walaupun hasil yang mereka dapat itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, kemampuan dalam membiayai anak-anak mereka yang masih sekolah tidaklah tergolong mampu, mereka hanya mampu menyekolahkan anak pada tingkat dasar dan walaupun diusahakan

dengan sangat berat mungkin anak-anak hanya mencapai sekolah lanjutan pertama.

Sementara hasil wawancara dengan penduduk lain mereka juga mengatakan bahwa selama bertani bertahun-tahun, perekonomian mereka juga tetap saja miskin dan lemah tanpa kenaikan yang berarti. Mereka juga sering mengatakan bahwa jadi petani hanya dapat *nunut mangan wae* (ikut makan saja) jadi tidak dapat mendapatkan keuntungan yang berarti. Dan penulis melanjutkan pertanyaan tentang kemungkinan mereka menimbun hasil panen sambil menanti harga naik para penduduk mengatakan bahwa Mereka menjual hasil panennya dengan harga murah karena desakan kebutuhan lain yang semakin menguat seperti kebutuhan anak-anaknya yang sekolah dan kebutuhan mereka membayar hutang kepada bank, sehingga mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah.

Dan ketika itu penulis bertanya mengenai pendidikannya, penduduk tersebut menjawab rata-rata berpendidikan sekolah dasar dan bahkan ada yang tidak tamat. Berangkat dari kenyataan ini, tingkat pendidikan merupakan suatu kendala tersendiri mengingat bahwa bila seseorang menamatkan pendidikannya sampai pada tingkat sekolah dasar dan atau bahkan tidak tamat maka kemungkinan sangat besar seseorang tersebut tidak mempunyai ketrampilan dan pengetahuan di bidang pertanian dan faktor-faktornya. Sehingga mereka dapat dikatakan kemampuan dalam mengolah faktor-faktor produksi yang ada untuk menjadikannya lebih bernilai tinggi

yang memungkinkan mereka memasuki peluang-peluang pasar. Hal ini terbukti dengan tidak pernah ditemuinya kreasi-kreasi atau inovasi-inovasi baru yang sifatnya meningkatkan perekonomian, misalnya petani yang menanam ketela pohon atau ketela rambat menjual hasil panennya secara apa adanya (menjual mentah) tanpa petani tersebut memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa ketela tersebut bila dimasak dan diolah menjadi kripik harganya akan naik.

2. Tentang keadaan pendidikan masyarakat desa Tanjungharjo dan kesempatannya dalam meningkatkan pendidikan anak.

Melihat pada kenyataan yang ada bahwa keadaan perekonomian warga masyarakat desa Tanjungharjo yang relatif lemah, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Mungkin dapatlah dikatakan bahwa bekerja sebagai petani dan buruh tani maka kemampuan perekonomian masyarakat desa Tanjungharjo dapat dikatakan lemah. Mereka tidak mempunyai pendapatan yang tinggi, daya beli terhadap barang-barang kebutuhan lemah, serta kurang mempunyai aset perekonomian yang memadai.

Selanjutnya mengacu pada hal-hal yang menghambat pendidikan yang telah dijelaskan pada bab II sebelumnya dimana perekonomian keluarga merupakan hal yang sangat mempengaruhi pada perjalanan pendidikan anak-anaknya dalam keluarga tersebut, yang dalam penjelasannya bahwa suatu keluarga dengan perekonomian yang lemah

maka secara teori tidak mampu membiayai pendidikan sekolah anaknya secara maksimal. Sesuai dengan hal ini berarti bahwa masyarakat desa Tanjungharjo yang bertingkat ekonomi lemah yang secara otomatis juga kurang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya secara maksimal.

Bahkan melihat pada kenyataan lain bahwa keadaan perekonomian negara Indonesia pada decade terakhir ini mengalami krisis global yang dapat dikatakan cukup parah, yang hal ini tentu saja membawa pengaruh yang sangat besar meningkatnya biaya-biaya kehidupan yang termasuk didalamnya biaya pendidikan yang melambung tinggi. Hal ini juga berkaitan langsung dengan masyarakat desa Tanjungharjo dengan makin mahalnya pendidikan maka kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi juga semakin lemah. Mengenai kemampuan masyarakat desa Tanjungharjo untuk menyekolahkan anak-anaknya dapat dilihat dengan jelas melalui data pendidikan anak-anak usia sekolah.

Tabel I
Jumlah penduduk usia sekolah yang sekolah dan tidak sekolah
Menurut tingkat wajib belajar 9 tahun

No	Keterangan	Sekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
1	Penduduk usia 7-15 tahun (usia wajib belajar) 9 tahun	874	114	988

Tabel II
Jumlah nak drop out menurut tingkat pendidikannya

No	Tingkat Pendidikan	DO	%
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	0	0
4	PT	0	0

Dari beberapa penjelasan table tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa batas kemampuan maksimal untuk menyekolahkan anak yang dimiliki oleh warga masyarakat desa Tanjungharjo rata-rata adalah masih kurang atau dengan kata lain dari seluruh keluarga yang mempunyai anak usia sekolah di desa Tanjungharjo dari keseluruhan anak-anak yang bersekolah dapat dijelaskan bahwa batas di mana seluruh (100%) keluarga yang mempunyai anak dapat menyekolahkan anaknya adalah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada tingkat SLTP sangatlah masih berkurang.

Jadi dengan demikian sebenarnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak di desa Tanjungharjo itu ada, namun bersifat relatif. Maksudnya yaitu bahwa dari jenjang pendidikan yang rendah ke jenjang pendidikan yang tinggi kesempatan untuk mengenyamnya semakain sempit.

3. Upaya-Upaya Masyarakat Tanjungharjo dalam Meningkatkan Pendidikan Anak

Usaha-usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat dan Pemerintah Desa pada dasarnya lebih ditekankan pada pemantapan perekonomian keluarga. Baik usaha-usaha ini dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun oleh Pemerintah Desa. Sebab siapapun tahu dengan perekonomian keluarga yang mantap dan baik maka kemungkinan untuk mengenyam pendidikan lebih besar.

Memang keadaan perekonomian yang sudah terlanjur lemah sulit untuk ditingkatkan namun hal itu tidaklah berarti bahwa masyarakat desa Tanjungharjo tidak berusaha untuk meningkatkannya.

Ada usaha lain yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat Desa Tanjungharjo yaitu dibidang pertanian atau lebih tepatnya usaha toko pertanian yang menyediakan sebagian keperluan pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Walaupun letaknya tidak terpencil namun jaraknya dengan pusat kota perekonomian (pasar) yang terletak di pusat kabupater sekitar 5 km.

Sementara usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan baik administratif maupun keuangannya bagi warga masyarakat yang mau mengusahakan suatu usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomian keluarga. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah Desa ini seperti

mempermudah pengurusan surat-surat keterangan, surat-surat pengantar dari desa dan surat izin usaha dengan tanpa memungut biaya yang tinggi.

Sedangkan dalam bidang pendidikan ada usaha yang juga dilakukan Pemerintah Desa yang diperlukan bagi masyarakat yang tidak mampu yaitu seperti surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa dari desa sebab surat keterangan tidak mampu dari desa ini menjadi syarat pengajuan beasiswa. Dimana dengan surat keterangan dari desa ini dapat dipakai oleh siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan beasiswa yang dapat memperingan beban orang tua dalam membiayai anaknya tersebut.

Di desa Tanjungharjo telah beberapa kali menerima mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) misalnya dari STAI Bojonegoro, dan UNIGORO. Disini Pemerintah Desa dan masyarakat betul-betul memanfaatkan keberadaan mahasiswa tersebut baik dari segi keilmuannya, pengetahuannya dan tenaganya. Sebab mahasiswa KKN tersebut terdiri dari berbagai jenis jurusan yang sesuai dengan keadaan Desa Tanjungharjo seperti pendidikan, pertanian, ekonomi, dan perdagangan. Sementara mahasiswa sendiri dengan segala kelebihanannya dibidang pengetahuannya diminta memberikan penyuluhan baik teori dan prakteknya dalam bidang pendidikan, pertanian, perikanan dan perdagangan serta memberikan cara-cara membuka peluang perdagangan terhadap hasil-hasilnya. Dengan pengetahuan dan tenaga mereka, masyarakat desa secara bertahap akan mendapatkan pengetahuan tentang bidang-bidang diatas.

Dalam penyajian ini penulis akan menyajikan data berdasarkan data hasil angket yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak.

TABEL III
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PENDIDIKAN TERAKHIR
ORANG TUA SEBELUM MEMASUKI HIDUP RUMAH TANGGA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	SD/MI	100	25	25
2.	SLTP/MTs		56	56
3.	SMU/MA		21	21
4.	Perguruan Tinggi		8	8
5.	Tidak Tamat SD		-	-
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan belum dari 100 % responden masyarakat/orang tua memberikan alternatif jawaban pernah sekolah di SD/MI sebanyak 25, SLTP/MTs sebanyak 56, SMU/MA sebanyak 21, Perguruan Tinggi 8 orang dan yang tidak tamat SD tidak ada (kosong). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sebelum memasuki hidup rumah tangga pernah sekolah di SLTP/MTs.

TABEL IV
DISTRIBUSI JAWABAN JUMLAH ANAK DARI ORANG TUA
YANG BERKELUARGA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Satu Anak	100	9	9
2.	Dua Anak		11	11
3.	Tiga Anak		33	33
4.	Empat - lebih		47	47
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 100 responden masyarakat/orang tua memberikan alternatif jawaban mempunyai satu anak 9, dua anak 11 orang, tiga anak 33 orang, dan empat sampai lebih 47 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari orang tua paling banyak mempunyai 4 anak atau lebih 47 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari orang tua paling banyak mempunyai 4 anak atau lebih.

TABEL V
DISTRIBUSI JAWABAN ORANG TUA MENYEKOLAHKAN
ANAK-ANAKNYA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	SD/MI	100	40	40
2.	SLTP/MTs		40	40
3.	SMU/MA		15	15
4.	Perguruan Tinggi		15	15
5.	Tidak Tamat		-	-
	Jumlah	100	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata anak-anak mereka semua dalam tarap menuntut pendidikan, dengan rincian SD/MI 40 anak, SMP/MTs 40 anak, SMU/MA 15 anak dan di Perguruan Tinggi 5 anak.

TABEL VI
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN ORANG TUA TENTANG
PENDIDIKAN TERKHIR ANAK-ANAKNYA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	SD/MI	100	40	40
2.	SMP/MTs		30	30
3.	SMU/MA		25	25
4.	Pergurua Tinggi		5	5
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir dari anak-anak mereka (orang tua) rata-rata tergolong masih rendah, dengan pertimbangan rincian sebagai berikut di SD/MI 40 anak, di SMP/MTs 30 anak, SMU/MA 25 anak dan Perguruan Tinggi 5 anak.

TABEL VII
DISTRIBUSI JAWABAN ORANG TUA DALAM RANGKA MENDIDIK ANAK

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Diajari sendiri	100	30	30
2.	Belajar dengan temannya		50	50
3.	Memanggil guru privat		5	5
4.	Mengaji		15	15
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden orang tua memberikan alternatif diajari sendiri 30, belajar dengan temannya 50, memanggil guru privat 5 dan mengaji 15.

TABEL VIII
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN TANGGUNGJAWAB PADA ANAKNYA SESUAI DENGAN KEMAMPUANNYA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Ya	100	30	30
2.	Tidak		10	10
3.	Kadang-kadang		60	60
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden orang tua memberikan alternatif jawaban ya sebanyak 30, tidak 10, dan memberikan alternatif jawaban kadang-kadang 60. Dengan demikian dapat disimpulkan para orang tua sebagian besar memberikan tanggungjawaban pada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya bersifat kadang-kadang.

TABEL IX
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG ORANG TUA
MENJAGA ANAK-ANAKNYA DARI PERGAULAN YANG TIDAK SEHAT,
YANG AKAN MENGHANCURKAN SENDI-SENDI MORAL ANAK

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Ya	100	70	70
2.	Tidak		5	5
3.	Kadang-kadang		25	25
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden orang tua memberikan alternatif jawaban ya 70, tidak 5 dan memberikan alternatif jawaban kadang-kadang 25 orang.

TABEL X
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PEKERJAAN ORANG TUA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Tani	100	20	20
2.	Buruh Tani		51	51
3.	TNI/ABRI		5	5
4.	PNS		20	20
5.	Pedagang		4	4
6.			-	-
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden orang tua memberikan alternatif jawaban bekerja di Tani 31 orang, Buruh Tani 40, TNI/ABRI 5, PNS 20 dan Pedagang 4 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari mereka (orang tua) bekerja di buruh tani.

TABEL XI
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG KECUKUPAN ORANG TUA
DALAM MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAKNYA

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Ya	100	41	41
2.	Tidak		49	49
3.	Kadang-kadang		10	10
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden orang tua, memberikan alternatif jawaban ya 41, tidak 49 orang, dan kadang-kadang 10 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua menyatakan tidak mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya.

TABEL XII
DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG UPAYA ORANG TUA
DALAM MENGINDAHKAN ANAK DARI LINGKUNGAN
YANG BERPENGARUH NEGATIF DENGAN KEBERHASILAN
PENDIDIKAN ANAK

NO	Alternatif Jawaban	N	F	%
1.	Dinasehati	100	73	73
2.	Tidak dilarang		27	27
3.	Diberikan kebebasan		-	-
	Jumlah	100	100	100

Dari tabel diatas menunjukkan dari 100 responden orang tua, memberikan alternatif jawaban dinasehati 73 orang, dilarang 27 dan diberi kebebasan tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua tidak terpengaruh ke hal-hal yang bersifat negatif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas dan berdasarkan pada perumusan masalah yang ada pada bab I, maka dalam sub bab ini penulis dapat memberikan dan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadaan ekonomi penduduk Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro rata-rata lemah. Hal ini terbukti dengan adanya keluarga di Desa Tanjungharjo masuk dalam kategori keluarga miskin. Yang hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu warga masyarakat rata-rata berpendidikan rendah sehingga sulit bersaing dengan warga lain yang berpendidikan tinggi dalam hal pekerjaan. Dan faktor lain adalah karena kultur pekerjaan masyarakat yangs ebagian besar bekerja sebagai petani kecil yang mengusahakan pertaniannya dengan rata-rata dan cara yang tradisional.
2. Mengenai upaya masyarakat Desa Tanjungharjo yang rata-rata bertingkat ekonomi lemah dalam meningkatkan pendidikan anak secara rata-rata dapat dikatakan sempit. Hal ini terbukti dengan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sempit kesempatan bagi anak-anak di Desa Tanjungharjo untuk mengenyamnya. Hal disebabkan oleh masalah

pembiayaan pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula biaya yang diperlukan.

3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, pada dasarnya diawali dengan upaya pemantapan dan peningkatan perekonomian keluarga terlebih dahulu. Dan usaha-usaha itu dilaksanakan oleh masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Tanjungharjo. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa antara lain berusaha mencari penghasilan sampingan disamping hasil pertanian, baik itu usaha dagang maupun usaha perikanan dan peternakan walaupun kecil-kecilan. Dalam bidang pertanian ada usaha masyarakat yang mendirikan toko pertanian yang dapat mempermudah mendapatkan keperluan-keperluan pertanian bagi masyarakat petani di Desa Tanjungharjo. Sementara usaha-usaha administratif dan biaya serta ijin bagi usaha-usaha warga masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian.

Demikian beberapa kesimpulan yang dikemukakan penulis yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

B. Saran-Saran

Untuk perbaikan selanjutnya dalam usaha peningkatan perekonomian warga masyarakat maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam bidang ekonomi, hendaknya terjalin keserasian dan keterpaduan yang erat antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam usaha

merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam usaha pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab hanya dengan keterpaduan dan keserasian tersebut pembangunan desa akan berjalan lancar dan berhasil guna.

2. Dalam bidang pertanian, sebaiknya masyarakat mengusahakan model pertanian yang modern dan berteknologi dengan menggunakan alat-alat dan cara-cara yang modern dengan demikian pertanian yang diusahakan akan lebih efektif dapat membawa hasil yang lebih besar, disamping itu warga masyarakat hendaknya dapat mencari terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru yang mengembangkan dan dapat mengolah hasil-hasil pertaniannya menjadi bahan yang lebih berharga tinggi bila dibanding dengan hasil yang masih mentah, sehingga dengan usaha tersebut peluang untuk meningkatkan penghasilan lebih besar.
3. Dalam hal pendidikan, sebagian masyarakat yang berilmu dan lebih berpengetahuan hendaknya memperhatikan keberadaan masyarakat lain yang berpendidikan rendah untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya pendidikan dalam menghadapi hidup sekarang ini. Hal ini sangat penting mengingat ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan anak hanyalah membuang-buang uang dan tidak ada gunanya. Dan menganjurkan agar dengan menyekolahkan anak

pada tingkat yang lebih tinggi dan tidak mengorbankan anaknya sudah sekolah untuk berhenti hanya karena alasan yang kecil.

4. Bagi sebagian masyarakat yang mempunyai kekayaan yang berlebihan atau dengan kata lain warga yang mempunyai kekayaan yang lebih untuk ikut memikirkan dan memberikan perhatiannya pada mereka-mereka yang kurang mampu ataupun tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan jalan memberikan bantuan-bantuan baik keuangan dan dorongan-dorongan serta semangat bagi yang tidak mampu untuk terus menyekolahkan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 1991., *Ilmu Sosial Dasar* Semarang : Rineka Cipta.
- Alfian, 1986., *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : UI Press.
- Ali, Mohammad., 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa.
- Bahreini T. Sugihini M., 1996. *Sosiologi Pedesaan : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Baswir, Rovrisond., 1999. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Chambers, Robert., 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Pengantar oleh Dawam Rahardjo, Jakarta : LP3ES.
- Hamid, Edy Suandi., 1997. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Eds. Moh. Mahfud dkk., Yogyakarta : UII Press.
- Hartomo dan Drs. Arnicun Aziz, tt. *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung : Bumi Aksara.
- Idris, Zahari dan H. Lisman Jamal, 1992. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : Gramedia.
- Indar, Djumberansyah., 1994. *Filosafat Pendidikan*, Surabaya : Karya Abditama.
- Seotrisno, Loekman., 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Cet. I, Yogyakarta : Kanisius.
- Singarimbun, Masri HonLLD., 1996. *Penduduk dan Perubahan Yogyakarta* :, Pustaka Pelajar Offset.
- Sjahrir., 1999. *Masuk Krisis Keluar Krisis : para tokoh menggugat*, Eds. Henry Raymond dan Dion P. Sihotang, Cet. I, Jakarta : Erlangga.
- Sunyoto, Usman., 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Susetyawan, 1999. *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Cet. II. Eds. Moh. Mahfud dkk., Yogyakarta : UII Press.
- Tim Dosen FIP-IKIP Malang., 1980. *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Tjiptoherijono, Priyono., 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Loekman Sutrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Jogjakarta: Kanisius, 1997

Edi Suandi Hamid, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Eds. Moh. Mahfud dkk, Yogyakarta: UII Press, 1997

DAFTAR ANGKET

Responden : Orang Tua

Nama : _____

Alamat : _____

A. Petunjuk untuk mengisi atau menjawab pertanyaan

1. Mohon dibaca pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan seksama sebelum mengisi atau menjawab..
2. Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya dijawab dengan cara memberikan tandasilang (x) pada abjad a, b, c dan d yang dianggap benar.
3. Apabila menghendaki jawaban lain, mohon ditulis pada tempat yang telah terseida pada titik-titik.

B. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu peroleh sebelum memasuki hidup rumah tangga ?
 - a. SD/MI
 - b. SLTP/MTs
 - c. SLTA/MA
 - d. Perguruan Tinggi
2. Berapa jumlah putra/putri Bapak/Ibu ?
 - a. satu anak
 - b. Dua anak
 - c. Belum punya anak
 - d.anak
3. Apa pendidikan terakhir anak Bapak/Ibu sekarang ?

a. SD/MI = anak	c. SLTA = anak
b. SMP = anak	d. PT = anak
4. Bagaimana usaha Bapak/Ibu dalam rangka mendidik anak
 - a. Diajari sendiri
 - b. Belajar dengan temannya
 - c. Memanggil guru privat
5. Pernahkah bapak/Ibu memberikan tanggungjawab pada anak-anak sesuai dengan kemampuannya ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
6. Apakah Bapak/Ibu selalu menjaga anak-anak dari pergaulan yang tidak sehat, yang akan menghancurkan sendi-sendi moral anak ?

- a. Ya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak
7. Apa pekerjaan dari bapak/Ibu ?
- a. Tani
 - b. Buruh
 - c. ABRI
 - d. PNS
 - e. (pekerjaan lainnya)
8. Apakah dengan penghasilan dari pekerjaan anda dapat memenuhi biaya dalam meningkatkan pendidikan anak anda ?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
9. Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam menghindarkan anak dari lingkungan yang berpengaruh negatif dengan keberhasilan pendidikan anak anda ?
- a. Dinasehati
 - b. Dilarang
 - c. Diberikan kebebasan

Instrumen Interview

A. Bagi Kepala Desa dan Perangkat lainnya

1. Bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Tanjungharjo Kec.Kapas Kab. Bojonegoro ?
2. Bagaimana klasifikasi tingkat perekonomian masyarakat Desa Tanjungharjo Kec.Kapas Kab. Bojonegoro?
3. Bagaimana klasifikasi tingkat pendidikan anak-anak di Desa Tanjungharjo ?

B. Bagi Masyarakat/Orang Tua

1. Bagaimana keinginan anda menyekolahkan anak anda ke jenjang yang lebih tinggi ?
2. Bagaimana usaha anda untuk menyekolahkan anak anda pada sekolah yang lebih tinggi ?
3. Bagaimana menurut anda hubungan antara tingkat ekonomi yang rendah dalam meningkatkan pendidikan anak ?